



Laporan Tahunan 2023

Annual Report 2023

Kantor Pusat

Komp. Srijaya Abadi Blok J No. 5-6
Nagoya - Batam
Telp. 0778 450787
Fax. 0778 450785

Kantor Cabang

Jalan A. Yani No. 58-59
Kolong - Tg Balai Karimun
Telp. 0777 31668
Fax. 0777 31676

website : www.bprck.co.id,
email : bprcentralkepri@bprck.co.id

Informasi Umum PT BPR Central Kepri

Per Desember 2023

Nama

PT Bank Perkreditan Rakyat
Central Kepri

Bidang Usaha

Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Tanggal pertama kali beroperasi

8 April 2010

Dasar Hukum Pendirian

Akte Pendirian Nomor 2 tanggal 3 November 2009

Dengan Akta Notaris Anly Cenggana, SH, Disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-62241.AH.01.01 Tahun 2009, tanggal 22 Desember 2009

Modal Dasar

Rp 10.000.000.000,-

Modal Disetor

Rp 6.000.000.000,- yang ditempatkan dalam 6000 lembar saham

Kepemilikan Saham

Paulus Amat Tantoso – 34,16%

Kui Kiong – 16,67%

Linda – 16,67%

Yati – 16,67%

Sui Kit - 8,33%

Ing Ing Cindy Eva – 3,33%

Asmin Patros – 2,5%

Bun Heng – 1,67%

Kantor Pusat

Komplek Srijaya Abadi Blok J No. 5 – 6

Nagoya – Batam

Telp. 0778 450787

Jumlah Jaringan

1 Kantor Cabang

Jalan Ahmad Yani No. 58 – 59

Kolong – Tanjung Balai Karimun

Telp. 0777 31668

Jumlah Karyawan

35 orang

Website perusahaan : www.bprck.co.id

Dewan Komisaris dan Direksi

Harun Pandapotan - Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia

Domisili di Batam

Usia 46 tahun

Merupakan Sarjana Ekonomi dari STIE IBBI Jakarta (1999) dan Sarjana Hukum dari Universitas Batam (2015), Memulai karir sebagai Akuntan di PT Golden Eye Kreatifindo (1999-2000), Akuntan di PT Bintan Resort Cakrawala (2000-2003), Partner dari Kantor Konsultan Pajak KII (2003-sekarang), Komisaris Utama pada PT Surya Fajar Capital Tbk (2019 - sekarang), Direktur PT Trio Investama (2012 - sekarang), Menjabat sebagai Komisaris Utama PT BPR Central Kepri sejak tahun 2014.

Tidak terafiliasi dengan Direksi, Anggota Komisaris Lainnya dan Pemegang Saham Pengendali

Zachary Jacob Heryanto - Komisaris *)

Warga Negara Indonesia

Domisili di Batam

Usia 36 tahun

Merupakan Sarjana Program Studi Profesi Dokter dari Universitas Taruma Negara.

Terafiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali.

*) Efektif menjabat per 1 Februari 2024

Agus Dianto - Direktur Utama

Warga Negara Indonesia

Domisili di Batam

Usia 43 tahun

Merupakan Sarjana Teknik Industri dari Universitas Bina Nusantara (2003). Meniti karir sebagai *Assistant Home Loan Sales* PT Bank BII (sekarang *Maybank*-tahun 2005-2008), *Area Manager AIG Insurance* (2008 - 2009), *Manager Marketing* di PT Sahabat Pentha Terang (2009 - 2010), *Manager Marketing* BPR Central Kepri (2010), Pimpinan Cabang Botania PT BPR Sejahtera Batam (2010 - 2015), dan menjabat sebagai Direktur Utama PT BPR Central Kepri sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini.

Tidak terafiliasi dengan Direksi, Anggota Komisaris Lainnya dan Pemegang Saham Pengendali

Veny Jeny Ria Togatorop - Direktur

Warga Negara Indonesia

Domisili di Batam

Usia 44 tahun

Menuntaskan Program Diploma 3 dari Politeknik Negeri Medan Jurusan Akuntansi Perbankan (2001). Meniti karir sebagai *Marketing Funding* PT Bank Niaga (sekarang Bank CIMB Niaga- 2003-2005), *Relationship Officer* Danamon Simpan Pinjam *Consumer Mass Market* (DSP CMM) PT Bank Danamon (2005 - 2007), *Sales Support Commercial Banking* PT Bank Danamon (2007 - 2008), Direktur PT BPR Dana Fanindo (2009 - 2012) dan menjabat sebagai Direktur PT BPR Central Kepri sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini. Direktur juga merangkap jabatan sebagai Direktur Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan.

Tidak terafiliasi dengan Direksi, Anggota Komisaris Lainnya dan Pemegang Saham Pengendali



Pejabat Eksekutif

Putri Lisa Andriani, Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Usia 38 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Medan (2008), Bergabung di PT BPR Central Kepri sejak tahun 2010 dan menjabat sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko sejak tahun 2022.

Jenni Pardede, Pejabat Eksekutif Internal Audit, Usia 43 tahun, memperoleh gelar Sarjana Muda Manajemen Akuntansi Lancang Kuning Tahun (2003), Bergabung di PT BPR Central Kepri sejak tahun 2010 dan saat ini menjabat sebagai Pejabat Eksekutif Internal Audit sejak tahun 2024.

Affif Muslikhatun, Manager Operasional Kantor Pusat Batam, Usia 37 tahun, memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi dari Universitas Negeri Jenderal Soedirman Purwokerto (2007), Bergabung sejak tahun 2010.

Yanto, Pimpinan Kantor Cabang Tanjung Balai Karimun, Usia 35 tahun, menempuh pendidikan di Apmi Kaplan Singapore Jurusan Information Technology (2008) bergabung di PT BPR Central Kepri sejak tahun 2021

Eka Gusriani Aryanti, Manager Bisnis Kantor Pusat Batam, Usia 34 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Ali Haji Tanjung Pinang (2012), Bergabung sejak tahun 2013.

Marviana, Manager Bisnis kantor Pusat Batam, Usia 27 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas International Batam (2019), Bergabung di PT BPR Central Kepri sejak tahun 2023.

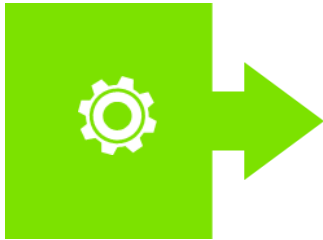


PENDAHULUAN

Tahun 2023 pemulihan Indonesia pasca pandemic Covid-19 masih berlanjut dan menunjukkan kinerja yang baik. Perekonomian Indonesia bertumbuh didukung oleh permintaan domestik serta aktivitas investasi yang tinggi.

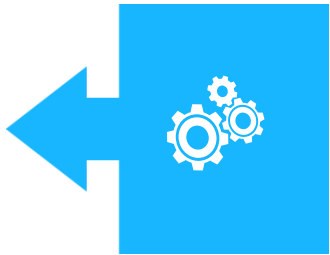
Dengan momentum ini BPR Central Kepri berhasil membukukan kinerja yang solid, yang ditandai dengan pertumbuhan aset. Kinerja bisnis dan keuangan yang sangat baik menunjukkan kemampuan BPR Central Kepri baik dalam bersaing di pasar yang kompetitif maupun dalam menjaga kepercayaan nasabah, vendor dan mitra bisnis. BPR Central Kepri menutup tahun 2023 dengan pertumbuhan lama yang kuat dan berada dalam posisi yang solid untuk menghadapi tantangan serta meraih peluang di masa yang akan datang.

Semua data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini adalah satu kesatuan dengan Laporan dari Kantor Akuntan Moh Wildan & Adi Darmawan, yang juga telah sesuai dengan ketentuan regulator.



Visi
Mewujudkan Bank Perkreditan Rakyat yang terpercaya dan professional

Misi
Menjadi Bank Perkreditan Rakyat yang terpercaya dan professional, yang didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan berkualitas yang dapat menjalankan fungsi intermediasi dengan benar demi meningkatkan perekonomian di Kepulauan Riau serta dapat memberikan keuntungan maksimal kepada seluruh pemegang saham PT BPR Central Kepri



Nilai Perusahaan



NILAI BPR CENTRAL KEPRI



BIDANG USAHA

PT BPR Central Kepri menjalankan usaha dan kegiatan di bidang perbankan sesuai dengan Anggaran Dasar PT BPR Central Kepri dan juga sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Maksud dan tujuan didirikannya PT BPR Central Kepri:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan /atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu
2. Memberikan kredit
3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan/atau Tabungan pada Bank lain



DASAR HUKUM PENDIRIAN

1. Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 03 Nopember 2009 dibuat di hadapan Anly Cenggana, SH., Notaris di Batam, Akta perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan Akta terakhir pada tahun 2021 melalui Notaris Mardiah Rasyid SH, M.Kn Nomor 84 tanggal 26 April 2021
2. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor. 12/22/KEP.GBI/DpG/2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Central Kepri tanggal 26 Maret 2010

KOMPOSISI SAHAM

No	Nama	Presentase Kepemilikan	Lembar Saham	Jumlah
1	Paulus Amat Tantoso	34%	2.050	Rp 2.050.000.000
2	Kui Kiong	17%	1.000	Rp 1.000.000.000
3	Linda	17%	1.000	Rp 1.000.000.000
4	Yati	17%	1.000	Rp 1.000.000.000
5	Ing Ing Cindy Eva	3%	200	Rp 200.000.000
6	Asmin Patros	2%	150	Rp 150.000.000
7	Bun Heng	2%	100	Rp 100.000.000
Jumlah		100%	6.000	Rp 6.000.000.000

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Pendapatan Operasional

Pendapatan Bunga Kredit

Rp 13 Milyar



42.7% YoY

Uraian	Tahun		
	2023	2022	%
Pendapatan Bunga			
a. Kredit Yang Diberikan	13.070.541.702	9.159.234.975	42.7%
b. Pendapatan Provisi & Adm	872.461.703	574.696.057	51.8%
Bunga dari Bank Lain			
a. Bunga Tabungan dan Giro	126.073.942	67.330.625	87.3%
b. Bunga Deposito	181.301.304	213.885.081	-15.2%
Jumlah	14.250.378.651	10.015.146.738	42.3%

Beban Bunga

Uraian	Tahun		
	2023	2022	%
Beban Bunga			
- Pihak Ketiga Bank	248.082.192	37.417.811	563%
Pihak Ketiga Bukan Bank			
- Tabungan	204.092.399	280.227.600	-27.2%
- Deposito	4.734.810.007	2.468.445.872	91.8%
- Biaya Transaksi	52.647.009	93.278.508	-77.2%
- Lain – Lain	190.528.669	87.071.070	118.8%
Jumlah	5.430.160.276	2.966.440.861	83.1%

Beban Bunga

Rp 5.4 Milyar



83.1% YoY

Laba Rugi

Earning After Tax

Rp 2.6 Milyar



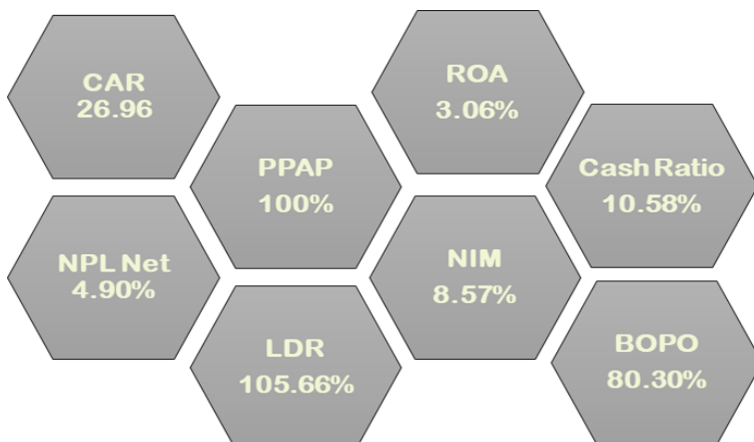
96.4% YoY

Tahun 2023 PT BPR Central Kepri mencatat laba Rp 3.240.492.238 gross / Rp 2.645.809.173 nett

LAPORAN LABA RUGI

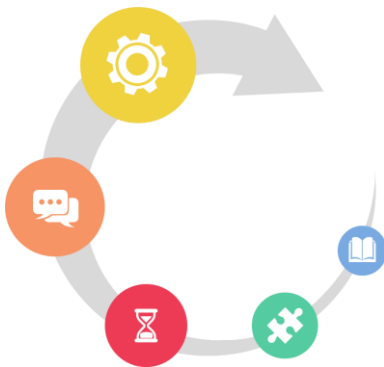
No.	Uraian	Tahun		
		2023	2022	%
1	Pendapatan Bunga	14.250.378.651	10.015.146.738	42.2%
2	Beban Bunga	(5.430.160.276)	(2.966.440.861)	83.1%
3	Pendapatan Bunga Neto	8.820.218.375	7.048.705.877	25.1%
4	Pendapatan Ops Lainnya	2.115.563.732	2.057.595.270	2.8%
5	Jumlah Pend Ops	10.935.782.107	9.106.301.147	16.7%
6	Jumlah Beban Ops	7.711.287.687	7.224.508.179	6.7%
7	L / R Operasional	3.224.494.420	1.881.792.968	71.3%
8	Pendapatan Non Ops	263.229.383	218.267.268	20.6%
9	Beban Non Ops	(247.231.565)	(438.960.053)	43.7%
10	Jumlah Pend Ops Ops	15.997.818	(220.692.785)	107.2%
11	Laba Sblm Pajak	3.240.492.238	1.661.100.183	95.1%
12	Pajak Penghasilan	(594.683.065)	(313.804.236)	89.5%
13	Laba Neto	2.645.809.173	1.347.295.947	96.4%

TINGKAT KESEHATAN



KREDIT BERMASALAH

Seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit yang berkembang pada tahun 2023, jumlah kredit bermasalah juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp 5.301.237.834 atau naik 125% YoY, dengan jumlah total jumlah kredit yang disalurkan sebesar Rp 107.974.866.429 (naik 59% YoY).



NPL Net pada posisi akhir tahun berada pada 4.90% atau lebih tinggi 1.43% dari posisi tahun sebelumnya (3.47%).

Kategori	2023	2022
Lancar	90.332.995.979	61.477.483.572
Dalam Perhatian Khusus	12.340.632.616	4.060.268.778
Kurang Lancar	754.741.224	709.143.771
Diragukan	3.367.669.535	999.701.320
Macet	1.178.827.075	647.897.205
Total Kredit	107.974.866.429	67.894.494.646
Total Kredit Bermasalah	5.301.237.834	2.356.741.296



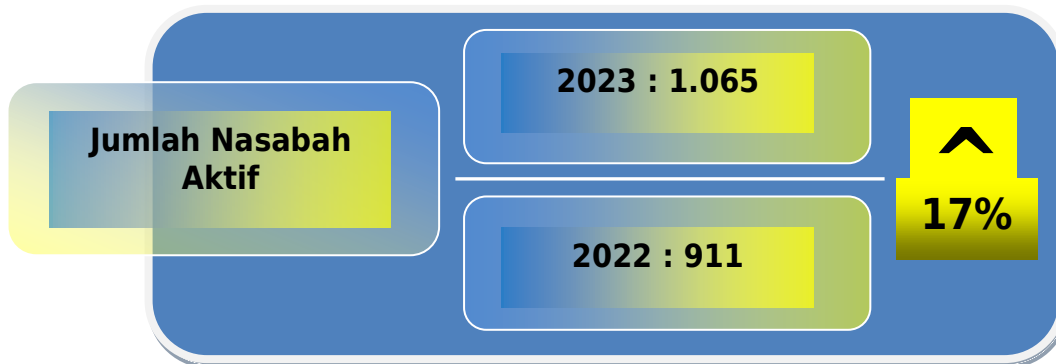
Ratio KAP mengalami kenaikan sebesar 1.18% menjadi 3.38% pada akhir tahun dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 2.20%.

PERKEMBANGAN USAHA

No.	Aktiva	2023	2022
1	Kas	349.974.200	570.262.300
2	Pendapatan bunga yang akan diterima	1.196.424.206	647.077.926
3	Antar Bank Aktiva	12.839.968.714	11.807.706.626
4	Kredit yang diberikan (net)	107.154.134.196	67.155.831.580
5	Agunan Yang Diambil Alih	1.782.091.851	2.306.216.934
6	Aktiva tetap dan Inventaris	87.963.041	52.815.790
7	Rupa-rupa Asset	440.990.139	1.118.431.560
	Jumlah Aktiva	123.851.546.347	83.658.342.716

Sejak tahun 2022 BPR Central Kepri mulai melakukan penyaluran kredit melalui perusahaan *Financial Technology (Fintech)* setelah mengantongi izin dari OJK. Selama periode 2023 BPR Central Kepri telah membukukan sebanyak 319 rekening kredit *channeling Fintech* dengan total *outstanding* posisi 31 Desember 2023 Rp 1.874.090.243, kolektibilitas seluruh debitur *channeling Fintech* pada posisi pelaporan 'Lancar'.

Tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar 17% YoY atas jumlah nasabah aktif yang dikelola oleh BPR Central Kepri



PROYEKSI RENCANA KERJA VS REALISASI

Pos	Proyeksi	Realisasi	Achv (%)
Asset	106.301.980.598	123.851.546.347	116.5%
Kredit	90.198.786.710	107.154.134.196	118.8%
Simpanan	92.583.050.330	108.186.501.013	116.8%

Laporan keuangan berada di atas Rencana Bisnis Tahun 2023 yang telah direncanakan



Realisasi rencana bisnis dan pertumbuhan usaha BPR Central Kepri salah satunya juga didukung dengan pertumbuhan kredit sindikasi yang pada beberapa tahun terakhir menunjukkan trend kenaikan (naik 304% YoY)



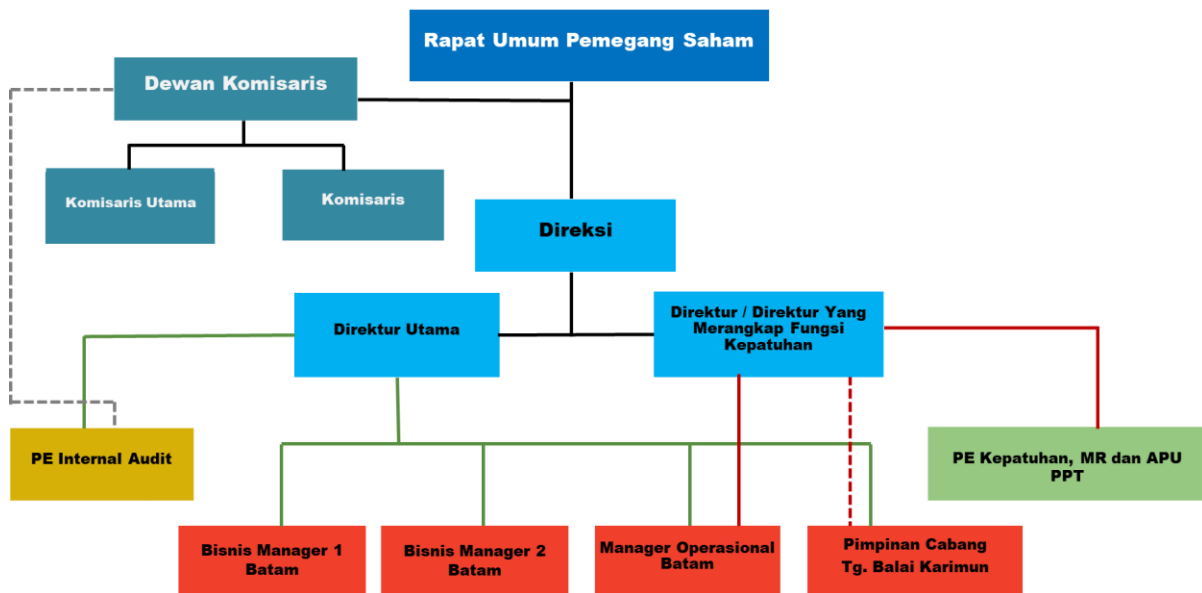
STRATEGI DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Strategi bisnis yang telah direncanakan pada tahun 2023 yaitu diantaranya :

1. Penghimpunan dana masyarakat dilakukan dengan gencar untuk mendukung pertumbuhan kredit yang cukup ekspansif pada tahun 2023. Diversifikasi program funding disesuaikan dengan event yang sedang terjadi di masyarakat seperti Program Tabungan Berhadiah, Tabungan untuk anak sekolah dan sebagainya
2. Deposito masih menjadi primadona dalam upaya penghimpunan dana masyarakat karena pasar funding yang sangat kompetitif
3. Penyaluran kredit diupayakan semaksimal mungkin di tengah situasi ekonomi pasca Covid-19 yang sedang berangsur pulih dan berkembang kembali
4. Kerja sama dengan beberapa showroom mobil second yang ada di Kota Batam dan Tanjung Balai Karimun memberikan efek positif terhadap perkembangan usaha BPR Central Kepri
5. Di tengah hype kredit sindikasi di kalangan BPR, BPR Central Kepri juga memanfaatkan moment kerjasama sindikasi baik sebagai Leader maupun sebagai member sindikasi
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan in house training ataupun pelatihan eksternal untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga mampu memberikan kualitas kerja terbaik kepada perusahaan
7. Penerapan Manajemen Risiko di setiap lini. Penerapan Manajemen Risiko pada tahun 2023 dilakukan terhadap 4 risiko yaitu : Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas
8. Penerapan Tata Kelola yang baik dengan mengedepankan prinsip tata kelola yaitu : Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran

LAPORAN MANAJEMEN

Struktur Organisasi PT BPR CENTRAL KEPRI Tahun 2023



Bidang usaha sesuai anggaran dasar dan kegiatan utama pada periode pelaporan

Bidang usaha dan kegiatan utama yang dijalankan oleh PT BPR Central Kepri sesuai dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Dasar PT BPR Central Kepri dan sesuai dengan ketentuan Otoritas.

Teknologi Informasi

Tahun 2023 PT BPR Central Kepri menggunakan *software* dari BIS dari PT Fokus Solusi Utama untuk *Core Banking System*, Di samping itu CCTV dan alarm pada gedung kantor yang selalu *online* dan dicek secara berkala. PT BPR Central Kepri juga telah mempunyai *website* yang dikelola dengan cukup baik dan informatif sebagai tindak lanjut dari Tata Kelola Perusahaan (GCG).

Perkembangan dan Target Pasar

Kantor Pusat PT BPR Central Kepri terletak di Kota Batam dan memiliki 1 kantor cabang yang berada di Tanjung Balai Karimun sehingga dapat memperluas jangkauan perusahaan dalam melayani masyarakat.

Lokasi Kantor

- ✚ Kantor Pusat yang beralamat di Komplek Srijaya Abadi Blok J No. 5-6 Nagoya - Batam
- ✚ Kantor Cabang yang beralamat di Jalan A Yani No. 58-59 Kolong, Tanjung Balai Karimun

Jaringan Kerja dan Mitra Usaha

Dalam kegiatan usaha PT BPR Central Kepri melakukan hubungan kerjasama dan bermitra dengan Show Room, Developer, Agent Property, Jasa Notaris, Jasa Penasehat Hukum dan Perusahaan Asuransi

Kepemilikan oleh anggota Direksi

- ✚ Direksi tidak memiliki kepemilikan saham di PT BPR Central Kepri

Keterkaitan antar pemilik dan pengurus

- ✚ 4 orang dari 8 orang pemegang saham memiliki keterkaitan satu sama lain
- ✚ Sesama anggota Direksi tidak memiliki keterkaitan satu sama lain
- ✚ Sesama anggota Dewan Komisaris tidak memiliki keterkaitan satu sama lain
- ✚ Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak memiliki keterkaitan satu sama lain
- ✚ Komisaris Utama memiliki keterkaitan dengan salah satu Pemegang Saham
- ✚ Komisaris memiliki keterkaitan dengan Pemegang Saham Pengendali *)

*) *Komisaris baru efektif diangkat pada Februari 2023*

Sumber Daya Manusia

Dalam kegiatan operasional PT BPR Central Kepri tahun 2023 didukung oleh 35 orang karyawan dengan jenjang pendidikan sebagai berikut :

- Diploma dan Sarjana S1 : 21 orang
- SLTA sederajat : 14 orang

Realisasi biaya pendidikan sebesar 118% dari anggaran.

Pendidikan	Jumlah
SMA	14 orang
Diploma	3 orang
Sarjana	18 orang
Total	35 orang

Gender	Jumlah
Laki - laki	16 orang
Perempuan	19 orang
Total	35 orang

Kebijakan Pemberian Gaji

Direksi dan Komisaris diberikan gaji/remunerasi sesuai dengan standar minimal yang berlaku dalam *peer group*.

Karyawan diberikan gaji sesuai dengan kinerja dan bobot kerja yang diterima. Kebijakan pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris termasuk bonus, tantiem dan fasilitas lain dituangkan dalam tata tertib Direksi dan tata tertib Dewan Komisaris.

Perubahan penting lain yang terjadi di PT BPR Central Kepri dan/atau kelompok usaha yang mempengaruhi operasional BPR dalam tahun 2023

Tidak terdapat perubahan lain yang mempengaruhi operasional BPR pada tahun 2023

Laporan Keuangan Tahunan

Neraca

Aktiva	2023	2022
Kas	349.974.200	570.262.300
Pendapatan bunga yang akan diterima	1.196.424.206	647.077.926
Antar Bank Aktiva	12.839.968.714	11.807.706.626
Kredit yang diberikan	107.154.134.196	67.155.831.580
Agunan Yang Diambil Alih	1.782.091.851	2.306.216.934
Aktiva tetap dan Inventaris	87.963.041	52.815.790
Rupa-rupa Asset	440.990.139	1.118.431.560
Jumlah Aktiva	123.851.546.347	83.658.342.716

Passiva	2023	2022
Kewajiban-kewajiban yang segera dibayar	1.540.339.450	1.038.808.178
Utang Bunga	288.757.226	163.587.693
Utang Pajak	279.719.629	132.071.958
Tabungan	8.544.493.175	9.832.957.055
Deposito berjangka	93.642.007.838	58.427.044.103
Antar Bank Pasiva	6.000.000.000	2.000.000.000
Modal		
a. Modal dasar	10.000.000.000	10.000.000.000
b. Modal yang belum disetor -/-	(4.000.000.000)	(4.000.000.000)
Selisih penilaian kembali Aktiva Tetap		
Cadangan :		
a. Cadangan Umum	1.200.000.000	1.200.000.000
b. Cadangan tujuan		
c. Laba yang ditahan	3.710.419.856	3.516.577.782
Tahun berjalan		
i. Laba	2.645.809.173	1.347.295.947
ii. Rugi -/-		
Jumlah Passiva	123.851.546.347	83.658.342.716

Laba-Rugi

Pos	2023	2022
Pendapatan dan beban Operasional		
Pendapatan Bunga		
Bunga Kontraktual	13.377.916.948	9.440.450.681
Provisi administrasi kredit	872.461.703	574.696.057
Total	14.250.378.651	10.015.146.738
Beban Bunga	(5.430.160.276)	(2.966.440.861)
Pendapatan bunga neto	8.820.218.375	7.048.705.877
Pendapatan operasional lainnya	2.115.563.732	2.057.595.270
Jumlah pendapatan operasional	10.935.782.107	9.106.301.147
Beban penyisihan kerugian/penyusutan		
Beban penyisihan kerugian tab/depo	278.932.770	41.616.556
Beban penyisihan kerugian kredit	427.827.836	930.660.539
Beban penyusutan Aset tetap dan inventaris	41.573.997	76.597.819
Beban pemasaran	16.539.655	35.328.623
Beban administrasi dan umum	6.674.161.127	5.946.820.396
Beban operasional lainnya	272.252.302	193.484.246
Jumlah beban operasional	7.711.287.687	7.224.508.179
Laba (Rugi) Operasional	3.224.494.420	1.881.792.968
Pendapatan (Beban) Non Operasional		
Pendapatan Non Operasional	263.229.383	218.267.268
Beban Non Operasional	(247.231.565)	(438.960.053)
Jumlah pendapatan (beban) Non Ops	15.997.818	(220.692.785)
Laba / Rugi sebelum pajak penghasilan	3.240.492.238	1.661.100.183
Pajak Penghasilan	594.683.065	313.804.236
Laba (Rugi) Neto	2.645.809.173	1.347.295.947

Laporan Perubahan Ekuitas

KETERANGAN	Modal Saham Disetor	Cadangan Umum	Jumlah Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Saldo awal 31 Desember 2021	6.000.000.000	1.200.000.000	4.430.069.717	11.630.069.717
Penambahan (pengurangan)	-	-	108.332.410	108.332.410
Kekurangan Pajak Badan 2021	-	-	(93.961.784)	(93.961.784)
Bonus 2021	-	-	(39.862.561)	(39.862.561)
Deviden	-	-	(888.000.000)	(888.000.000)
Laba Periode Berjalan	6.000.000.000	1.200.000.000	1.347.295.947	1.347.295.947
Saldo per 31 Desember 2022	-	-	4.863.873.730	12.063.873.729
Deviden	-	-	(1.000.000.000)	(1.000.000.000)
Bonus 2022	-	-	(153.453.873)	(153.453.873)
Laba Periode Berjalan	-	-	2.645.809.173	2.645.809.173
Saldo per 31 Desember 2023	6.000.000.000	1.200.000.000	6.356.229.030	13.556.229.029

Laporan Arus Kas

PT. BPR CENTRAL KEPRI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	2023	2022
	(Rp)	(Rp)
ARUS KAS DARI KEGIATAN USAHA		
Laba (Rugi) Neto	2.645.809.173	1.347.295.947
Penyesuaian untuk rekonsiliasi laba neto dengan kas yang dihasilkan		
Penyusutan aset tetap	37.667.750	57.847.816
Penyisihan asset produktif	(494.985.280)	(334.658.893)
Provisi & biaya transaksi	658.411.534	-
Amortisasi aset tidak berwujud	(3.906.248)	(18.750.000)
Lainnya	4.473.795.943	-
Perubahan Aset dan Kewajiban Operasi		
Penempatan pada bank lain	1.032.262.088	1.733.624.745
Pendapatan bunga yang akan diterima	(549.346.280)	(129.259.542)
Kredit yang diberikan	(40.080.374.783)	(16.688.769.654)
Agunan yang diambil alih	542.125.083	1.726.319.863
Aset lain lain	673.535.173	(458.462.114)
Kewajiban segera	501.531.272	(364.059.546)
Utang bunga	125.169.533	50.460.906
Utang Pajak	147.647.671	38.110.174
Simpanan dari nasabah	33.926.499.855	13.364.759.397
Simpanan pada bank lain	4.000.000.000	(2.000.000.000)
Kewajiban lain-lain		
Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi	7.617.842.484	(1.675.540.900)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pembelian asset tetap	(72.815.000)	(20.300.000)
Penghapusan Aset Tetap	(49.818.876)	
Arus Kas Neto dari Aktivitas Investasi	(122.633.876)	(20.300.000)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Bonus	(153.453.873)	(39.862.561)
Deviden	(1.000.000.000)	(888.000.000)
Kekurangan Pajak	-	(93.961.784)
Penambahan dan Pengurangan		(108.332.410)
Arus kas Neto dari Aktivitas Pendanaan	(1.153.453.873)	(1.130.156.755)
Kenaikan (Penurunan) kas dan setara kas	6.341.754.735	(2.825.997.655)
Kas dan Setara Kas Awal Periode	6.877.968.926	9.703.966.581
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	13.219.723.661	6.877.968.926

Rincian Kas dan Setara Kas Akhir
Periode :

Kas	349.974.200	570.262.300
Tabungan dan Giro	10.619.749.461	4.307.706.626
Deposito < 3 bulan	2.250.000.000	2.000.000.000
Kas dan Setara Kas Akhir Periode	13.219723661	6.877.968.926

Catatan atas Laporan Keuangan

Pada tahun 2023 PT BPR Central Kepri tidak ada melakukan hapus buku kredit

Komitmen dan Kontijensi

Passiva	2023	2022
KOMITMEN		
Fasilitas pinjaman yang diterima blm ditarik		-
Fasilitas kredit nasabah yang blm ditarik	4.459.000.000	845.600.000
KONTIJENSI		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian :		
Bunga kredit yang diberikan	723.008.188	357.116.578
Aktiva produktif hapus buku :		
Kredit yang diberikan	669.650.094	669.650.094
Pendapatan Bunga atas kredit hapusbuku	6.650.002	6.650.002
Lain-lain yang bersifat administrative	211.422.321	703.737.928
Jumlah	6.069.730.605	2.582.754.602

OPINI AKUNTAN PUBLIK

Opini dari Kantor Akuntan Publik Moh Wildan & Adi Darmawan sesuai dengan surat Nomor 00022/3.0420/AU.2/07/0388-1/1/I/2024 yang beropini bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT BPR Central Kepri tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntansi Publik (ETAP) di Indonesia.

INFORMASI LAINNYA

1. Ikhtisar kebijakan akuntansi

PT BPR Central Kepri menerapkan SAK ETAP dan PA BPR sejak tahun 2010 yaitu pada saat PT BPR Central Kepri beroperasi. Penyusunan Laporan Keuangan Bank disajikan untuk dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Laporan keuangan Bank disusun sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, SAK ETAP, PA BPR dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan BPR.

Dasar pengukuran laporan keuangan Bank yaitu berdasarkan biaya historis, biaya kini, nilai realisasi, nilai sekarang dan nilai wajar. Sedangkan dasar penyusunan laporan keuangan adalah dasar *accrual* kecuali untuk laporan arus kas. Ikhtisar kebijakan akuntansi Bank menyangkut kredit yang diberikan, penyisihan kerugian kredit, Agunan Yang Diambil Alih, Kas dan setara Kas, Aset Tetap dan Inventaris serta penyusutan, pengakuan pendapatan bunga, pengakuan beban bunga, pajak penghasilan dan imbalan kerja adalah seperti yang disajikan di Laporan Akuntan Publik.

2. Selama tahun 2023 tidak terdapat transaksi hubungan istimewa yang menyebabkan adanya benturan kepentingan.

3. Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BPMK selama tahun 2023

4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain

Yang dimaksud dengan paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi :

a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan lainnya antara lain tunjangan (benefit), tantiem dan bentuk remunerasi lainnya; dan

- b. Fasilitas lain dalam bentuk Natura/ Non Natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.
- c. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi dalam 1 tahun	Dewan Komisaris	Direksi
Di atas 500 juta	-	2 orang
250 juta - 500 juta	1 orang	-
100 juta - 250 juta	-	-
50 juta - 100 juta	-	-
Di bawah 50 juta	-	-

No	Jenis Remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah yang diterima dalam 1 tahun (juta Rp)			
		Dewan Komisaris		Direksi	
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, termasuk fasilitas lain dalam bentuk Non Natura)	1	Rp 180.000.000	2	Rp 1.301.839.417
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb) a. Dapat dimiliki b. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-

5. Pelaksanaan Program Edukasi & Literasi Nasabah Tahun 2023

Pelaksanaan program edukasi nasabah pada tahun 2023 dilakukan secara online dengan memanfaatkan sosial media PT BPR Central Kepri untuk memberikan edukasi kepada nasabah maupun masyarakat umum mengenai keuangan maupun sharing berita-berita maupun informasi yang berguna bagi nasabah dan juga masyarakat.

6. Pelaksanaan penerapan Manajemen Risiko dilakukan terhadap seluruh proses operasional dan seluruh bagian, begitu juga dengan penerapan APU PPT dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur. Refreshment terhadap aturan-aturan maupun ketentuan baik eksternal dan internal secara periodik dilakukan sehingga seluruh karyawan yang terlibat dalam proses operasional Bank dapat memahami dan update terhadap aturan maupun ketentuan baru.

Demikianlah Laporan Tahunan 2023 ini dibuat sebagai pertanggungjawaban Direksi PT BPR Central Kepri.

Batam, 28 April 2024
Direksi PT BPR Central Kepri



Agus Dianto
Direktur Utama



Veny Jeny Ria T
Direktur

Rekap Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

No	FAKTOR PENILAIAN	Bobot BPR	SEMESTER 1		SEMESTER 2	
		B	Nilai Faktor	Nilai Akhir	Nilai Faktor	Nilai Akhir
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00	1.50	0.300	0.30	0.060
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00	1.67	0.251	0.27	0.041
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	-	-	-	-	-
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00	2.00	0.200	0.21	0.021
5	Penerapan fungsi kepatuhan	10.00	1.90	0.190	0.20	0.020
6	Penerapan fungsi audit intern	10.00	2.00	0.200	0.20	0.020
7	Penerapan fungsi audit ekstern	2.50	2.00	0.050	0.05	0.001
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	10.00	2.00	0.200	0.20	0.020
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.50	2.00	0.150	0.15	0.011
10	Rencana bisnis	7.50	2.00	0.150	0.15	0.011
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan serta pelaporan intenal	7.50	2.00	0.150	0.15	0.011
	Total bobot	100.00				
	Nilai Komposit			1.80		0.20
	Peringkat Komposit (berdasarkan rekap 11 faktor atau diinput langsung)			2	2.00	2
	Predikat Komposit			Baik		Baik

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR posisi bulan Juni, mempertimbangkan penilaian atas penerapan tata kelola posisi bulan Desember tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi atau permasalahan dalam penerapan tata kelola selama 6 (enam) bulan terakhir.

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**

Profil BPR

Nama BPR	PT.BPR CENTRAL KEPRI
Alamat BPR	Komplek Srijaya Abadi Blok J no 5-6 Nagoya Batam
Posisi Laporan	Desember, 2023
Modal Inti BPR	Rp13,835,158,238
Total Aset BPR	Rp123,850,755,928
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Memenuhi
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Direksi bertempat tinggal di Batam dan dibuktikan dengan Tanda Pengenal berdomisili di Batam
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Direksi tidak ada rangkap jabatan
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Direksi tidak memiliki hubungan keluarga/semenda dengan anggota Pengurus lain
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					-
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				-
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				-
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				-
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				-
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				-
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				-
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		v				-
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				-
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Kebijakan strategis di bidang kepegawaian telah disosialisasikan
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		v				-
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				-
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.8
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.18
	Penjumlahan S + P + H						1.48
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.30

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.			v			Jumlah anggota Dewan Komisaris telah terpenuhi
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Terpenuhi
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Terpenuhi
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Terpenuhi
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				Modal Inti kurang dari Rp.50,000,000,000,-
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Terpenuhi
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Terpenuhi
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Terpenuhi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Belum diwajibkan untuk memenuhi Komisaris Independent
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.56
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.78

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		v				Terpenuhi
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Terpenuhi
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		v				Terpenuhi
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Terpenuhi
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Terpenuhi
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Terpenuhi
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		v				Terpenuhi
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				Terpenuhi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Terpenuhi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.78
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.27

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Telah dijalankan dengan baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v			Telah dijalankan dengan baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.30
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2.10
	Penjumlahan S + P + H						2.10
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.21

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				-
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						BPR sudah menunjuk PE Kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		v				
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				-
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		v				-
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				-
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				-
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				-
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v				-
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v				-
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						Terpenuhi
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		v				
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				-
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v				-
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v				-
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				-
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				-
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				-
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		v				-
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				-
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		v				-
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.05

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;		v				
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		v				-
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		v				-
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				-
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		v				-
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.15

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				-
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.15

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.30	0.27	-	0.21	0.20	0.20	0.05	0.20	0.15	0.15	0.15	1.87
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan

Penerapan tata kelola tahun 2023 berjalan dengan cukup baik, pemenuhan terhadap jumlah anggota Dewan Komisaris akan dilakukan pada semester berikutnya.


Bank Perekonomian Rakyat
CentralKepri
Mitra Sukses Anda

Agus Dianto
Direktur Utama

Harun Pandapotan
Komisaris Utama